

LAPORAN RENCANA KERJA (Rencana Kerja) TAHUN 2021



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Alun-alun Utara no. 7 Telp.(0334)8780990
LUMAJANG - 67316



KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan visi, misi dan pencapaian sasaran serta tujuan yang ditetapkan, berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, diperlukan penyusunan Rencana Kerja sebagai jaminan obyektif untuk tercapainya tugas pokok dan fungsi.

Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2021 yang terangkum dalam buku ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar dalam Rencana Kerja Tahunan untuk melaksanakan tugas bagi Aparat Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Harapan kami dengan tersusunnya Rencana Kerja ini akan memberikan dukungan yang optimal dalam peningkatan kinerja dan kegiatan di Tahun 2021.

Lumajang, 11 Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG



YOGA PRATOMO, S.STP
Pembina Tk.I/IV/b
NIP. 19780910 199802 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB. I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 3 |
| BAB. II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020 | 5 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu..... | 5 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan | 12 |
| 2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi | 14 |
| 2.4. Penentuan Isu – Isu Strategis | 18 |
| 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 19 |
| 2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 34 |
| BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 42 |
| 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Daerah | 42 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD..... | 50 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 51 |
| BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 55 |
| 4.1. Program Utama | 55 |
| 4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja | 56 |
| 4.3. Alokasi Anggaran | 58 |
| BAB V : PENUTUP | 78 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, maka secara sinergi pula Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis PD (Renstra-PD) 2018 - 2023. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Atas dasar hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023. Untuk mengimplementasikan dan mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, maka perlu untuk ditetapkan dan disusun Rencana Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA PD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis PD. Dengan demikian RENJA PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA PD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/10/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

11. Perda Kabupaten Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Komunikasi.
13. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informasi dalam pelaksanaan misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran RENJA PD, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai rencana kerja program – program dan kegiatan – kegiatan yang akan di laksanakan pada waktu jangka 1 (satu) tahun kedepan serta sumber pendanaan dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2020 berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2020. Target dan Realisasi dapat dilihat pada tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan | |
|------|--|---|--|---|--|---|-----------------------------|--|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun bejalan (Tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/9) |
| | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | |
| | Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan TIK | 75% | 75% | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Informatika | Jumlah web aplikasi/ sub domain yang dikelola | 31 Informasi | 36 Informasi | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | Pemberdayaan Informatika | Jumlah SDM yang mengikuti bimtek | 80 Orang | 160 Orang | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement | 300 Paket | 192 Paket | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa | Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa | 75% | 75% | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | Jumlah forum PPID yang dibina | 72 PPID | 72 PPID | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | Kerjasama Informasi dengan Media Massa | Jumlah konten informasi yang disebarluaskan | 400 konten | 3.918 konten | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | Pengelolaan Radio Suara Lumajang | Jumlah Partisipasi masyarakat dalam program acara Radio Suara Lumajang | 700 Partisipan | 8.130 Partisipan | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik | Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat | 80% | 80% | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | Peningkatan Kemitraan Komunikasi Publik | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina | 21 KIM | 21 KIM | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | Pengelolaan Media Publik | jumlah saluran sebaran informasi melalui media luar ruangan (banner/baliho/vidiotron/angjungan informasi), media sosial/media center, majalah, dan sebar serap informasi. | 126 buah | 201 buah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | STATISTIK | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan data statistik daerah | 60% | 60% | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah | Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah i kepada masyarakat | 10 Informasi | 173 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | PERSANDIAN | | | | | | | | | |
| | Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah | Persentase penyebarluasan informasi yang bersandi | 40% | 40% | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian | Jumlah informasi yang bersandi | 50 Informasi | 50 Informasi | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | |
| | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai | Persentase penyebarluasan informasi ketentuan di bidang cukai | 70% | 70% | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ Pemangku Kepentingan | Jumlah sebaran informasi melalui banner/baliho/videotron/media massa/sosialisasi | 3 jenis | 3 jenis | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|---------------|-------------|
| Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu. | NIHIL | NIHIL | 70% | 23% | 33% | 80% | 100% | 125% |
| Pengelolaan dan Pengembangan Informatika | Jumlah terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu | NIHIL | NIHIL | 33 website | 16 website | 48% | 35 website | 35 website | 100% |
| Pemberdayaan Informatika | Jumlah Pengguna SPBE yang dibina | NIHIL | NIHIL | 340 orang | 185 orang | 54% | 350 orang | 440 orang | 126% |
| Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement | NIHIL | NIHIL | 200 Paket | 100 Paket | 50% | NIHIL | NIHIL | 0% |
| Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa | Meningkatnya Persentase diseminasi informasi publik | NIHIL | NIHIL | 80% | 40% | 50% | 100% | 49,63% | 50% |
| Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | Jumlah forum PPID yang dibina | NIHIL | NIHIL | 72 PPID | 72 PPID | 100% | 122 PPID (72 PPID Pembantu dan 50 PPID Desa) | 122 PPID | 100% |
| Kerjasama Informasi dengan Media Massa | Jumlah konten informasi yang disebarluaskan | NIHIL | NIHIL | 400 konten | 122 konten | 31% | 405 konten | 376 Konten | 93% |
| Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik | Jumlah konten informasi yang tersedia | NIHIL | NIHIL | 400 konten | 200 konten | 50% | 405 konten | 386 Konten | 95% |
| Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik | Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat | NIHIL | NIHIL | 20% | 10% | 50% | 65% | 64,03% | 99% |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Peningkatan Kemitraan Komunikasi Publik | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memiliki blog | NIHIL | NIHIL | 41 KIM | 20 KIM | 49% | 41 KIM | 41 KIM | 100% |
| Pengelolaan Media Publik | jumlah media publik yang dikelola | NIHIL | NIHIL | 7 media publik | 7 media publik | 100% | 6 media publik | 4 Media Publik | 67% |
| STATISTIK | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | NIHIL | NIHIL | 1 sistem | 1 sistem | 100% | 1 sistem | 1 sistem | 100% |
| Layanan Data dan Statistik | Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi kepada masyarakat | NIHIL | NIHIL | 16 data | 8 data | 50% | 21 data | 21 data | 100% |
| PERSANDIAN | | | | | | | | | |
| Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | NIHIL | NIHIL | 60% | 34% | 57% | 70% | 100% | 143% |
| Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian | Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi | NIHIL | NIHIL | 50 PD | 24 PD | 48% | 55 PD | 55 PD | 100% |
| PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | |
| Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai | Persentase cakupan penyampaian informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai | NIHIL | NIHIL | 98% | 48% | 49% | 98% | 92,03% | 94% |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|
| | Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ Pemangku Kepentingan | Jumlah saluran penyampaian ketentuan perundan-undangan di Bidang Cukai | NIHIL | NIHIL | 4 Saluran penyampaian informasi | 4 Saluran penyampaian informasi | 100% | 4 Saluran penyampaian informasi | 4 Saluran penyampaian informasi | 100% |
|--|---|--|-------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|

Dari hasil data diatas dapat diketahui bahwa pada Kegiatan Pengelolaan Media Publik Realisasi kinerjanya sebesar 67%, target kinerja 2020 yaitu jumlah media publik yang dikelola 6 media publik, sedangkan Realisasi Capaian Kinerja yang dicapai adalah sebesar 4 media publik, tidak tercapainya target kinerja dikarenakan terjadi kerusakan pada beberapa media publik yang dikelola seperti videotron, maka solusi untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya dan tahun-tahun kedepan adalah dengan melaksanakan perbaikan/pemeliharaan pada media yang rusak.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------------|-------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Jumlah saluran komunikasi dan informasi | NIHIL | NIHIL | - | 273 | 294 | 400 | 405 | NIHIL | NIHIL | |
| 2 | Jumlah web aplikasi/sub domain | NIHIL | NIHIL | - | 14 | 31 | 33 | 35 | NIHIL | NIHIL | |
| 3 | Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| 4 | Presentase badan publik yang menerapkan standar layanan informasi publik | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 80% | 83% | 85% | 88% | |

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berikut ini isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang antara lain:

1. Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakat.
2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK) dan blank spot pancaran sinyal radio.
3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK / gagap teknologi (gaptek).
4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika.
5. Kurang optimalnya ketersediaan data yang mutakhir.
6. Belum optimalnya sistem persandian yang modern.
7. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya.
8. Keterbatasan SDM yang ada di Dinas komunikasi dan informatika.

**Tabel
Pemetaan Permasalahan**

| NO. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|------------|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) | 1 Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakat | 1.1 Secara geografi, kabupaten Lumajang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi yang diapit oleh dua gunung berapi (Gunung Semeru, Gunung Lemongan). Aksesibilitas di kawasan pemukiman warga di dataran tinggi merupakan tantangan bagi Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi. |
| | | | 1.2 Adanya blank spot. Secara infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pedesaan dan perkotaan sangat berbeda. Di wilayah pedesaan tidak banyak ditemui menara-menara telekomunikasi, sebaliknya di wilayah perkotaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tersebar diseluruh wilayah perkotaan. |
| | | | 1.3 Kondisi alam dapat menjadi faktor pembatas/hambatan |
| | | | 1.4 Media informasi tidak sepenuhnya dapat diakses masyarakat |
| | | | 1.5 Banyak kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang belum sepenuhnya tersosialisasikan kepada masyarakat baik melalui penyuluhan tatap muka langsung atau melalui saluran-saluran dalam jaringan (online) |
| | | | 1.6 Membangun kesadaran dan kewaspadaan para aparat pemerintah daerah dalam rangka mencegah berbagai aksi penyalahgunaan yang berpotensi mengganggu jalannya roda pemerintahan. |
| | | 2 Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK) dan blank spot pancaran sinyal radio | 2.1 Infrastruktur TIK yang belum maksimal menjangkau seluruh wilayah pedesaan, sehingga daya beli masyarakat pedesaan terhadap perangkat TIK (komputer, laptop, smartphone yang semakin meningkat tidak sebanding dengan pemanfaatan perangkat TIK |
| | | | 2.2 Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dan cara penggunaan aplikasi yang tersedia |
| | | | 2.3 Teknologi informasi dan komunikasi memiliki keunggulan sekaligus kekurangan |

| | | | | |
|--|---|--|-----|--|
| | | | 2.4 | Teknologi yang digunakan sudah tergolong usang dan kurang adaptif |
| | | | 2.5 | Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan dana guna pembaruan perangkat TIK |
| | | | 2.6 | Media publik dan Kelompok Informasi Masyarakat masih belum memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan sebar serap informasi yang jumlahnya sangat besar. |
| | | | 2.7 | Potensi resiko kebocoran data dan informasi terbuka lebar karena tidak adanya tindakan yang sama di antara satuan kerja perangkat daerah dalam melakukan pengamanan data dan informasi. |
| | 3 | Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK / gagap teknologi (gaptek) | 3.1 | Tingkat pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berbeda-beda, Ada kelompok atau individu tertentu yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk hal-hal yang negatif, sehingga menimbulkan persepsi yang buruk terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). |
| | | | 3.2 | Capaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Lumajang relatif rendah |
| | | | 3.3 | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun komunikasi dengan pemerintah melalui saluran dalam jaringan (online) seperti turut serta memberikan umpan balik, komentar, maupun reaksi terhadap semua akun media sosial yang di miliki pemerintah masih rendah |
| | | | 3.4 | Kedudukan susunan organesasi didaerah atau unit persandian masing-masing daerah berbeda. |
| | 4 | Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika | 4.1 | Tidak semua Perangkat Daerah memiliki unit khusus pengelola aplikasi |
| | | | 4.2 | Terdapat aplikasi yang dikelola Perangkat Daerah terkait yang dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah namun belum terintegrasi dengan aplikasi penunjang lainnya |
| | | | 4.3 | Kurangnya kemampuan ASN dalam pengoperasian aplikasi |
| | | | 4.4 | Informasi yang diterima masyarakat sangat bergantung pada media |
| | | | 4.5 | Pemenuhan SDM berkopetensi ,perlunya pelatihan atau di diklatkan. |
| | 5 | Kurang optimalnya ketersediaan data yang mutakhir. | 5.1 | Banyak terjadi ketidakseragaman data antara satu instansi dengan instansi lainnya sehingga diragukan keakuratan dan kevalidannya |

| | | | | |
|--|---|---|-----|---|
| | | | 5.2 | Data tidak hanya memiliki beragam versi, namun sering juga saling kontradiktif di antara data yang satu dengan yang lainnya |
| | | | 5.3 | Data tidak dikelola secara serius sehingga ketersediaan data yang mutakhir (<u>up to date</u>) masih kurang |
| | | | 5.4 | Masih enggannya banyak pihak dalam melakukan integrasi pengelolaan data lintas sektoral |
| | 6 | Belum optimalnya sistem persandian yang modern. | 6.1 | Masih enggannya banyak pihak dalam melakukan integrasi pengelolaan informasi lintas sektoral |
| | | | 6.2 | Di zaman modern keamanan informasi tidak hanya dilaksanakan oleh sandiman ,pengamanan bukan hanya di kamar sandi tetapi pelaksanaan keamanan informasi secara menyeluruh dengan memanfaatkan TIK. |
| | 7 | Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya. | 7.1 | Kurang optimalnya pelayanan administrasi perkantoran |
| | | | 7.2 | Kurang optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana aparatur |
| | 8 | Kurangnya pemantauan program dan evaluasi kegiatan dan anggaran. | 8.1 | Kurangnya perhatian/ dukungan dari beberapa unit kerja. |
| | | | 8.2 | Kurang disiplinnya administrasi pelaporan realisasi kegiatan dan anggaran. |

2.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu – isu strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakat.
2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK) dan blank spot pancaran sinyal radio.
3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK / gagap teknologi (gaptek).
4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika.
5. Kurang optimalnya ketersediaan data yang mutakhir.
6. Belum optimalnya sistem persandian yang modern.
7. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya.
8. Keterbatasan SDM yang ada di Dinas komunikasi dan informatika.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2021 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena ada perubahan SOTK pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tabel T-C.31

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

| No | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | catatan penting |
|----|---|---------------------------------|---|----------------|---------------------|---|---------------------------------|--|----------------|----------------------|---|
| | Program Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | pagu indikatif (Rp) | Program Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN MEDIA MASSA | Dinas Kounikasi dan Informatika | Meningkatnya Persentase diseminasi informasi publik | 83% | 4.247.415.200 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Dinas Kounikasi dan Informatika | Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat | 80% | 3.602.720.610,00 | Perbedaan di kegiatan karena ada penyesuaian ke Permendagri No. 90 tahun 2019 |
| | Kerjasama Informasi dengan Media Massa | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah konten informasi yang disebarluaskan | 410 konten | 1.921.798.000 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat | 82 KIM | 3.602.720.610,00 | |
| | Penyelenggaraan Kehumasan Daerah | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah konten berita yang dipublikasikan | 410 konten | 1.435.754.200 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah saluran opini yang dipantau | 3 saluran | 31.980.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|--|----------------|--------------------|---|--|--|-------------|----------------|
| | Pengelolaan Media Publik | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah media publik yang dikelola | 6 media publik | 889.863.000 | Pelayanan Informasi Publik | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah PPID yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas | 172 ppid | 119.147.800,00 |
| 2 | PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK | | Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu. | 80% | 523.298.500 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah KIM yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas | 41 KIM | 93.670.000,00 |
| | Peningkatan Kemitraan Komunikasi Publik | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah KIM yang memiliki blog | 41 KIM | 325.255.500 | Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah unsur pemangku kepentingan yang bermitra dengan pemerintah daerah | - | 0,00 |
| | Penyelenggaraan Informasi Publik | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah forum PPID yang dibina | 172 PPID | 198.043.000 | Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah peserta sosialisasi ketentuan perundang undangan di bidang cukai (DBHCHT) | 950 peserta | 323.999.830,00 |
| 3 | PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI | | Persentase cakupan penyampaian informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai | 98% | 860.000.000 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Dinas Kounikasi dan Informatika | Persentase diseminasi informasi publik | 100% | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------|--|---------------------------------|--|----------------|----------------|
| | Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah saluran penyampaian ketentuan perundang-undangan di bidang cukai | 4 saluran penyampaian informasi | 860.000.000 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah konten informasi yang dipublikasikan | 400 | |
| | | | | | | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah | 12 agenda | 141.120.000,00 |
| | | | | | | Manajemen Komunikasi Krisis | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah laporan analisis isu terindikasi krisis | 12 laporan | 473.003.200,00 |
| | | | | | | Layanan Hubungan Media | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah berita yang dipublikasikan | 500 berita | 965.000.000,00 |
| | | | | | | Layanan Hubungan Media | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah frekuensi promosi yang di publikasikan melalui media massa (DBHCHT) | 4 kali | 529.258.380,00 |
| | | | | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah partisipasi masyarakat dalam dialog interaktif | 500 partisipan | 192.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|------------|----------------------|--|--|---|----------------|-------------------------|
| | | | | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah komunitas yang bermitra dengan LPPL Radio Suara Lumajang | 50 komunitas | 207.766.400,00 |
| | | | | | | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah jenis konten informasi yang dipublikasikan | 6 Jenis Konten | 223.662.000,00 |
| | | | | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah media publik yang dikelola | 6 media | 302.113.000,00 |
| 4 | PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) | Dinas Kounikasi dan Informatika | Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu. | 80% | 5.933.523.300 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Dinas Kounikasi dan Informatika | Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu. | 90% | 1.020.651.200,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|------------|---------------|--|--|---|------------------------------------|----------------------|
| | Pengelolaan dan Pengembangan Informatika | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan, dan desa yang terpadu | 44 website | 5.502.135.300 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah domain dan sub domain yang dikelola | 1 Domain dan 264 Subdom ain | 14.310.000,00 |
| | Pemberdayaan Informatika | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah pengguna SPBE yang dibina | 360 orang | 431.388.000 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah nama domain pemerintah daerah yang terdaftar | 1 Domain | 150.000,00 |
| | | | | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah domain dan subdomain yang dipantau | 1 Domain dan 264 Subdoma in | 14.160.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---------------------|-------------------------|
| | | | | | | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal | 1 Pusat Data | 1.006.341.200,00 |
| | | | | | | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola | 1 Pusat Data | 508.117.200,00 |
| | | | | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah website/aplikasi yang dipantau | 44 Website | 19.824.000,00 |
| | | | | | | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah website/aplikasi yang dikembangkan | 45 website/aplikasi | 263.400.000,00 |
| | | | | | | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah peserta pertemuan forum TIK | 80 Orang | 3.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|-----------------|--------------------|--|--|--|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik | 80 Orang | 9.000.000,00 |
| | | | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah Peserta Forum Smart City | 80 Orang | 203.000.000,00 |
| 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH | Dinas Kounikasi dan Informatika | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | 1 sistem | 332.464.000 | PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi | 1 Sistem | 185.582.000,00 |
| | Layanan Data dan Statistik | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi | 24 data | 332.464.000 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi | 24 Data | 185.582.000,00 |
| | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan | 24 Data | 44.338.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|-------|-------------|---|--|---|-------------|----------------------|
| | | | | | | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah SDM yang dibina | 80 Orang | 9.000.000,00 |
| | | | | | | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia | 24 Data | 132.244.000,00 |
| 6 | PROGRAM PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH | Dinas Kounikasi dan Informatika | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | 70% | 115.500.000 | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Dinas Kounikasi dan Informatika | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | 90% | 68.297.400,00 |
| | Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi | 68 PD | 115.500.000 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota | Dinas Kounikasi dan Informatika | Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan | 1 Peraturan | 22.277.400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|------------|----------------------|--|--|---|---------------|-------------------------|
| | | | | | | Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah jaring komunikasi sandi pemerintah daerah yang beroperasi | 3 jenis | 22.277.400,00 |
| | | | | | | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi | 10 PD | 46.020.000,00 |
| | | | | | | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah informasi yang bersandi | 375 informasi | 46.020.000,00 |
| 7 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Dinas Kounikasi dan Informatika | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran | 97% | 1.126.532.600 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Kounikasi dan Informatika | Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran | 100% | 3.900.227.760,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--|------------|----------------------|
| | Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang disediakan | 9 jenis pelayanan administrasi | 1.126.532.600 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Kounikasi dan Informatika | Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | 98% | 13.413.300,00 |
| 8 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Dinas Kounikasi dan Informatika | persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | 98% | 848.698.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah jenis dokumen perencanaan | 7 Jenis | 4,881,600 |
| | Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia/direhab | 10 jenis sarpras | 629.388.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 2.569.400,00 |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara | 8 jenis sarana dan prasarana | 219.310.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.476.700,00 |
| 9 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Dinas Kounikasi dan Informatika | Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan | 70% | 12.568.400 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah dokumen LAKIP | 1 Dokumen | 1.732.800,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|-----------|-----------|--|--|---|--------------|-------------------------|
| | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah laporan lakip yang disusun | 1 laporan | 3.762.400 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD | 2 Dokumen | 2.752.800,00 |
| | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun | 1 laporan | 480.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dinas Kounikasi dan Informatika | Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 98% | 2.397.929.307,00 |
| | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun | 1 laporan | 1.856.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan | 23 ASN | 2.338.245.975,00 |
| | Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah laporan IKM | 1 laporan | 951.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN | 2 Fasilitasi | 50.472.492,00 |
| | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah dokumen RKA yang disusun | 3 dokumen | 5.519.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD | 1 Fasilitasi | 4.380.000,00 |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 jenis | 2.313.600,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|-------------|----------------------|
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah Jenis Laporan Keuangan | 3 jenis | 2.517.240,00 |
| | | | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dinas Kounikasi dan Informatika | Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah | 98% | 9.638.700,00 |
| | | | | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD | 2 Dokumen | 3.725.600,00 |
| | | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah fasilitas penatausahaan BMD | 2 Fasilitas | 5.913.100,00 |
| | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dinas Kounikasi dan Informatika | Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD | 98% | 83.077.350,00 |
| | | | | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah Fasilitas Administrasi Kepegawaian | 2 Fasilitas | 3.016.800,00 |
| | | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai | 1 Laporan | 1.732.250,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-----------------------|
| | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan | 3 ASN | 8.700.000,00 |
| | | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan | 10 ASN | 40.294.400,00 |
| | | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian | 11 ASN | 29.333.900,00 |
| | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dinas Kounikasi dan Informatika | Persentase fasilitas Administrasi Umum PD | 98% | 309.636.445,00 |
| | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan | 10 Jenis | 9.076.870,00 |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan | 4 Jenis | 86.328.000,00 |
| | | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan | 2 Jenis | 23.798.775,00 |
| | | | | | | Penyediaan Bahan/Material | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan | 1 Jenis | 4.204.200,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|-------------|-----------------------|
| | | | | | | Fasilitas Kunjungan Tamu | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah fasilitas kunjungan tamu | 1 Fasilitas | 4.650.000,00 |
| | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah fasilitas rakor SKPD | 2 Fasilitas | 181.578.600,00 |
| | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dinas Kounikasi dan Informatika | Persentase fasilitas pengadaan BMD | 98% | 403.138.450,00 |
| | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 10 Jenis | 403.138.450,00 |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dinas Kounikasi dan Informatika | Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor | 98% | 497.744.208,00 |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah fasilitas jasa surat menyurat | 2 Fasilitas | 3.228.000,00 |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah rekening yang dibayar | 3 Rekening | 246.428.208,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|---|--------------|----------------|
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor | 4 Fasilitasi | 248.088.000,00 |
| | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dinas Kounikasi dan Informatika | Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD | 98% | 185.650.000,00 |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara | 4 Kendaraan | 138.500.000,00 |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah alat besar yang dipelihara | 1 Jenis | 6.700.000,00 |
| | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas Kounikasi dan Informatika | Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 3 Jenis | 40.450.000,00 |

Berdasarkan Uraian tabel T-C.31, juga mendukung tentang program dan kegiatan yang mengacu pada pengarusutamaan gender Tahun 2021 yang terletak pada Program Informasi Dan Komunikasi Publik.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.

Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2021
KABUPATEN LUMAJANG

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|----|--|---|---|---------------------|---------|
| 1 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat | 80% | |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat | 82 KIM | |
| | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah saluran opini yang dipantau | 3 saluran | |
| 2 | Pelayanan Informasi Publik | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah PPID yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas | 172 ppid | |

| | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|--|----------------|--|
| | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah KIM yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas | 41 KIM | |
| | Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah peserta sosialisasi ketentuan perundang undangan di bidang cukai (DBHCHT) | 950 peserta | |
| | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Persentase diseminasi informasi publik | 100% | |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah konten informasi yang dipublikasikan | 400 | |
| 4 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah | 12 agenda | |
| | Manajemen Komunikasi Krisis | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah laporan analisis isu terindikasi krisis | 12 laporan | |
| 5 | Layanan Hubungan Media | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah berita yang dipublikasikan | 500 berita | |
| | Layanan Hubungan Media | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah frekuensi promosi yang di publikasikan melalui media massa (DBHCHT) | 4 kali | |
| | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah partisipasi masyarakat dalam dialog interaktif | 500 partisipan | |
| 6 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah komunitas yang bermitra dengan LPPL Radio Suara Lumajang | 50 komunitas | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah jenis konten informasi yang dipublikasikan | 6 Jenis Konten | |
| 7 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah media publik yang dikelola | 6 media | |
| | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu. | 90% | |
| 8 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah domain dan sub domain yang dikelola | 1 Domain dan 264 Subdomain | |
| | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah nama domain pemerintah daerah yang terdaftar | 1 Domain | |
| | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah domain dan subdomain yang dipantau | 1 Domain dan 264 Subdomain | |
| 9 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal | 1 Pusat Data | |
| | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola | 1 Pusat Data | |
| | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah website/aplikasi yang dipantau | 44 Website | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|---------------------|--|
| | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah website/aplikasi yang dikembangkan | 45 website/aplikasi | |
| | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah peserta pertemuan forum TIK | 80 Orang | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik | 80 Orang | |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah Peserta Forum Smart City | 80 Orang | |
| | PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi | 1 Sistem | |
| | Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi | 24 Data | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektor | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan | 24 Data | |
| | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah SDM yang dibina | 80 Orang | |
| | Membangun Metadata Statistik Sektor | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia | 24 Data | |
| | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | 90% | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---------------|--|
| | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan | 1 Peraturan | |
| | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah jaring komunikasi sandi pemerintah daerah yang beroperasi | 3 jenis | |
| | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi | 10 PD | |
| | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah informasi yang bersandi | 375 informasi | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran | 100% | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | 98% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah jenis dokumen perencanaan | 7 Jenis | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--------------|--|
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah dokumen LAKIP | 1 Dokumen | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD | 2 Dokumen | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 98% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan | 23 ASN | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN | 2 Fasilitasi | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD | 1 Fasilitasi | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 jenis | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah Jenis Laporan Keuangan | 3 jenis | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah | 98% | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD | 2 Dokumen | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD | 2 Fasilitasi | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD | 98% | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|-------------|--|
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah Fasilitas Administrasi Kepegawaian | 2 Fasilitas | |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai | 1 Laporan | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan | 3 ASN | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan | 10 ASN | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian | 11 ASN | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Persentase fasilitas Administrasi Umum PD | 98% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan | 10 Jenis | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan | 4 Jenis | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah jenis barang cetak yang disediakan | 2 Jenis | |
| | Penyediaan Bahan/Material | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan | 1 Jenis | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah fasilitas kunjungan tamu | 1 Fasilitas | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah fasilitas rakor SKPD | 2 Fasilitas | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Persentase fasilitas pengadaan BMD | 98% | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--------------|--|
| | Pemerintah Daerah | | | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 10 Jenis | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor | 98% | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat | 2 Fasilitasi | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah rekening yang dibayar | 3 Rekening | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor | 4 Fasilitasi | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD | 98% | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara | 4 Kendaraan | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah alat besar yang dipelihara | 1 Jenis | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 3 Jenis | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Daerah

a. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangun Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 sebagaimana dirumuskan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dijabarkan sebagaimana berikut.

A. Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan semangat Sasanti/moto Kabupaten Lumajang yaitu **“Amreta Brata Wira Bhakti”**, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang tidak sekadar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, Masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta dalam menjadikan Lumajang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Lumajang dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional, maupun global.

B. Misi

Misi dalam RPJMD ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelesaian isu-isu strategis Kabupaten Lumajang. Adapun tiga rumusan misi RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan layanan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, upaya peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta peningkatan dukungan terhadap kepemudaan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

c. **Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi**

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*); penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN. Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan *good and clean governance* merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implementasi *Smart City* sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai bagian dari *Smart City*, diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mengemban misi ke tiga, yakni: **“Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.”** Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika (Tabel T-B.35), Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah:

1. Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakat.
2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan,

khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK) dan blank spot pancaran sinyal radio.

3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK / gagap teknologi (gaptek).
4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika.
5. Kurang optimalnya ketersediaan data yang mutakhir.
6. Belum optimalnya sistem persandian yang modern.
7. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya.
8. Keterbatasan SDM yang ada di Dinas komunikasi dan informatika.

Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Telaahan Rentra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota

Pemersalahan Pelayanan SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan OPD | Sebagai Faktor | |
|----|---|---|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1. | Masih adanya kesenjangan komunikasi sosial dan teknologi informasi di masyarakat antara provinsi besar dengan | Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara desa dan | <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan professional • Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan | <ul style="list-style-type: none"> • Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo • Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | provinsi yang masih tertinggal | kota | Database SKPD | didayagunakan |
| 2. | Belum meratanya penyebaran teknologi informasi di daerah perbatasan dan terpencil | Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat • Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK | <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik • Pengembangan muatan e-Government • Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik |
| 3. | Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada aturan baku yang mengatur urusan bidang komunikasi dan informatika seperti website, hosting dan colocation dll. | |
| 4. | Belum siapnya daerah dalam menyusun rencana induk tata kelola TIK | Belum adanya Rencana Induk Tata Kelola TIK (Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025) | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi | |

c. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS RPJMD pada prinsipnya menilai kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD yang lebih memperhatikan aspek keberlanjutan.

Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Lumajang, perumusan skenario maupun rekomendasinya dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel
Telaah KLHS

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Target TPB | Indikator TPB | Data capaian | Strategi pencapaian | Program |
|--|---|--|---|--|---|
| Tujuan 16 : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan | Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | 16.6.1.(c) Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan. | Capaian 73,96. Belum terpenuhi untuk menjadi 80% | Mengembangkan <i>E-procurement</i> dengan memperluas akses kepada semua Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan fasilitas bagi masyarakat untuk dapat mengakses <i>E-procurement</i> 2. Peningkatan fasilitas pelayanan <i>E-procurement</i> 3. Penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat mengenai <i>E-procurement</i> |
| Tujuan 17: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi | Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas | 17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang | 100%, walaupun menurun dari tahun sebelumnya 108,11 | 1a Memperluas akses data dan informasi pemerintah kepada | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan fasilitas internet yang menjangkau semua wilayah Penyuluhan mengenai website |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan | kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang | mengakses data dan informasi statistik melalui website. | | masyarakat melalui website 1b Meningkatkan layanan website agar mudah diakses oleh masyarakat | pemerintah 2. Penyuluhan mengenai webdiste pemerintah 3. Penyuluhan untuk edukasi masyarakat terkait dengan website pemerintah sebagai media bertukar informasi |
| | Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. | 17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet. | | 1. Penambahan jaringan Internet 2. Peningkatan kecepatan jaringan internet 3. Penyediaan fasilitas internetmurah | Mempertahankan program dan kegiatan yang sebelumnya sudah ada |

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

a. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)”

b. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu;
2. Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, Formula dan Target Tahun 2021

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | FORMULA | TARGET TAHUN 2021 |
|---|---|--|---|-------------------|
| Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) | - | Persentase penerapan SPBE oleh PD | Jumlah PD Yang Sudah Menerapkan SPBE | 100% |
| | | | Jumlah Seluruh PD | |
| | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan | Persentase PD pengguna sistem elektronik | Jumlah PD pengguna sistem elektronik yang terpadu | 90% |
| | | | X 100% | |

| | n berbasis TIK yang terpadu | yang terpadu | Jumlah PD yang ada | | |
|--|--|--|---|--|-----|
| | Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik | Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik | $\frac{\text{Jumlah Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik}}{\text{Jumlah Badan Publik}} \times 100\%$ | | 85% |

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan kegiatan:

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan:

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
- Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
- Manajemen Komunikasi Krisis
- Layanan Hubungan Media

- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik

2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan:

- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Dengan sub kegiatan:

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah

3. Program Aplikasi Informatika dengan kegiatan

- Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan:

- Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan kegiatan:
- Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektorial
 - Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - Membangun Metadata Statistik Sektorial
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Utama

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan – kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

Tabel 4.1

Program Utama dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021

| No | PROGRAM | KEGIATAN |
|----|---|--|
| 1. | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota |
| 2. | Program Aplikasi Informatika | 1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah |
| 3. | Program Penyelenggaraan Statistik Sektor | 1. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah |
| 4. | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 1. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota |
| 5. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |

| | | |
|--|--|---|
| | | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|--|--|---|

4.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran yang ingin dicapai/dihasilkan dari Rencana Kerja ini adalah dalam jangka waktu satu tahun. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.2

Sasaran dan Indikator Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021

| NO | PROGRAM | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA |
|----|---|--|---|---|
| 1. | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Meningkatnya cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat | <p><u>Output:</u></p> 1. Jumlah cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat 2. Jumlah konten informasi yang dipublikasikan <p><u>Outcomes</u> Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan</p> | 82 KIM 400 konten 80% |

| NO | PROGRAM | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA |
|----|---|--|--|--|
| | | | kelompok informasi masyarakat | |
| 2. | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Meningkatnya pembangunan website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu. | <p>Output: Jumlah domain dan sub domain yang dikelola</p> <p>Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal</p> <p>Outcomes Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.</p> | <p>1 Domain dan 264 Subdomain</p> <p>1 Pusat Data</p> <p>90%</p> |
| 3. | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Meningkatnya Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi | <p>Output: Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi</p> <p>Outcomes Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi</p> | <p>24 Data</p> <p>1 Sistem</p> |
| 4. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Meningkatnya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | <p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan 2. Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi <p>Outcomes Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah</p> | <p>1 Peraturan</p> <p>10 PD</p> <p>90%</p> |

| NO | PROGRAM | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA |
|----|---|--|--|---|
| 5. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran | <p><u>Output:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD Persentase fasilitasi pengadaan BMD Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD <p><u>Outcomes</u> Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</p> | <p>98%</p> <p>98%</p> <p>98%</p> <p>98%</p> <p>98%</p> <p>98%</p> <p>98%</p> <p>98%</p> |

4.3 Alokasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp. 8,777,478,970,-** dengan seluruhnya digunakan untuk Belanja Langsung. Adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Lumajang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
|------|--|--|---|------------------------------|---|----------------|--------------------|--------------------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | |
| | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 80% | 3.602.720.610 | DAU | | 100% | 4.034.992.671 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|-----------|---------------|------------|--|------------------|-------------------|
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 82 KIM | 3.602.720.610 | DAU | | 123 KIM | 4.034.992.671 |
| | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah saluran opini yang dipantau | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 3 saluran | 31.980.000 | DAU | | 3 saluran | 35.178.000 |
| | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah PPID yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 172 ppid | 119.147.800 | DAU | | 222 ppid | 131.062.580 |
| | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah KIM yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 41 KIM | 93.670.000 | DAU | | 41 KIM | 103.037.000 |
| | Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah unsur pemangku kepentingan yang bermitra dengan pemerintah daerah | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | - | - | DAU | | 2 unsur | 72.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|--|-------------|---------------|
| | Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah peserta sosialisasi ketentuan perundang undangan di bidang cukai (DBHCHT) | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 950 peserta | 323.999.830 | DBHCHT | | 950 peserta | Rp356.399.813 |
| | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase diseminasi informasi publik | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 100% | | DAU | | | |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah konten informasi yang dipublikasikan | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 400 | | DAU | | | |
| | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 12 agenda | 141.120.000 | DAU | | 12 agenda | 155.232.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|--|----------------|---------------|
| | Manajemen Komunikasi Krisis | Jumlah laporan analisis isu terindikasi krisis | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 12 laporan | 473.003.200 | DAU | | 12 laporan | 520.303.520 |
| | Layanan Hubungan Media | Jumlah berita yang dipublikasikan | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 500 berita | 965.000.000 | DAU | | 505 berita | 1.061.500.000 |
| | Layanan Hubungan Media | Jumlah frekuensi promosi yang di publikasikan melalui media massa (DBHCHT) | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 4 kali | 529.258.380 | DBHCHT | | 4 kali | 582.184.218 |
| | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah partisipasi masyarakat dalam dialog interaktif | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 500 partisipan | 192.000.000 | DAU | | 500 partisipan | 211.200.000 |
| | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah komunitas yang bermitra dengan LPPL Radio Suara Lumajang | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 50 komunitas | 207.766.400 | DAU | | 50 komunitas | Rp228.543.040 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|----------------|---------------|------------|--|----------------|---------------|
| | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah jenis konten informasi yang dipublikasikan | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 6 Jenis Konten | 223.662.000 | DAU | | 6 Jenis Konten | 246.028.200 |
| | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media publik yang dikelola | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 6 media | 302.113.000 | DAU | | 6 media | 332.324.300 |
| | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu. | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 90% | 1.020.651.200 | DAU | | 100% | 1,020,651,200 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|--|----------------------------|----------------------|
| | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah domain dan sub domain yang dikelola | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 1 Domain dan 264 Subdomain | 14.310.000 | DAU | | 1 Domain dan 264 Subdomain | 4.314.535.320 |
| | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah nama domain pemerintah daerah yang terdaftar | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 1 Domain | 150.000 | DAU | | 1 Domain | 165.000 |
| | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah domain dan subdomain yang dipantau | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 1 Domain dan 264 Subdomain | 14.160.000 | DAU | | 1 Domain dan 264 Subdomain | 15.576.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|---------------------|---------------|------------|--|---------------------|----------------------|
| | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 1 Pusat Data | 1.006.341.200 | DAU | | 1 Pusat Data | 1.163.711.320 |
| | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 1 Pusat Data | 508.117.200 | DAU | | 1 Pusat Data | 558.928.920 |
| | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah website/aplikasi yang dipantau | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 44 Website | 19.824.000 | DAU | | 54 Website | 21.806.400 |
| | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah website/aplikasi yang dikembangkan | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 45 website/aplikasi | 263.400.000 | DAU | | 65 website/aplikasi | 289.740.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|-----------------|-------------|------------|--|-----------------|--------------------|
| | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah peserta pertemuan forum TIK | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 80 Orang | 3.000.000 | DAU | | 80 Orang | 3.300.000 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 80 Orang | 9.000.000 | DAU | | 80 Orang | 9.900.000 |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Peserta Forum Smart City | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 80 Orang | 203.000.000 | DAU | | 80 Orang | 223300000 |
| | PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL | Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 1 Sistem | 185.582.000 | DAU | | 1 Sistem | 448.940.200 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|----------|-------------|------------|--|----------|-------------|
| | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 24 Data | 185.582.000 | DAU | | 28 Data | 448.940.200 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 24 Data | 44.338.000 | DAU | | 28 Data | 48.771.800 |
| | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang dibina | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 80 Orang | 9.000.000 | DAU | | 80 Orang | 9.900.000 |
| | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 24 Data | 132.244.000 | DAU | | 28 Data | 145.468.400 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------|------------|------------|--|-------------|-------------------|
| | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 90% | 68.297.400 | DAU | | 100% | 75.127.140 |
| | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota | Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 1 Peraturan | 22.277.400 | DAU | | 3 jenis | 24.505.140 |
| | Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jaring komunikasi sandi pemerintah daerah yang beroperasi | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 3 jenis | 22.277.400 | DAU | | 3 jenis | 24.505.140 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|---------------|---------------|------------|--|---------------|----------------------|
| | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 10 PD | 46.020.000 | DAU | | 30 PD | 50.622.000 |
| | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah informasi yang bersandi | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 375 informasi | 46.020.000 | DAU | | 375 informasi | 50.622.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 100% | 3.900.227.760 | DAU | | 100% | 4.699.805.536 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|------------------|------------|------------|--|------------|-------------------|
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 98% | 13.413.300 | DAU | | 98% | 14.754.630 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah jenis dokumen perencanaan | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 7 Jenis | 4,881,600 | DAU | | 7 Jenis | 5.369.760 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 2 Dokumen | 2.569.400 | DAU | | 2 Dokumen | 2.826.340 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 1 Dokumen | 1.476.700 | DAU | | 1 Dokumen | 1.624.370 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|--------------|---------------|------------|--|--------------|----------------------|
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen LAKIP | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 1 Dokumen | 1.732.800 | DAU | | 1 Dokumen | 1.906.080 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 2 Dokumen | 2.752.800 | DAU | | 2 Dokumen | 3.028.080 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 98% | 2.397.929.307 | DAU | | 98% | 2.637.722.238 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 23 ASN | 2.338.245.975 | DAU | | 25 ASN | 2.572.070.573 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 2 Fasilitasi | 50.472.492 | DAU | | 2 Fasilitasi | 55.519.741 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|--------------------|-----------|------------|--|--------------------|-------------------|
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah fasilitas penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 1 Fasilitas | 4.380.000 | DAU | | 1 Fasilitas | 4.818.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 1 jenis | 2.313.600 | DAU | | 1 jenis | 2.544.960 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Jenis Laporan Keuangan | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 3 jenis | 2.517.240 | DAU | | 3 jenis | 2.768.964 |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 98% | 9.638.700 | DAU | | 98% | 10.602.570 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------------|------------|------------|--|----------------|------------|
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 2 Dokume n | 3.725.600 | DAU | | 2 Dokumen | 4.098.160 |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah fasilitas penatausahaan BMD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 2 Fasilitas | 5.913.100 | DAU | | 2 Fasilitas | 6.504.410 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 98% | 83.077.350 | DAU | | 98% | 39.793.955 |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Fasilitas Administrasi Kepegawaian | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 2 Fasilitas | 3.016.800 | DAU | | 2 Fasilitas | 3.318.480 |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 1 Laporan | 1.732.250 | DAU | | 1 Laporan | 1.905.475 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 3 ASN | 8.700.000 | DAU | | 3 ASN | 9.570.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|------------|-------------|------------|--|----------|-------------|
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan | DISKOMINFO KAB.LUMAJANG | 10 ASN | 40.294.400 | DAU | | 10 ASN | 44.323.840 |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian | DISKOMINFO KAB.LUMAJANG | 11 ASN | 29.333.900 | DAU | | 11 ASN | 32.267.290 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase fasilitas Administrasi Umum PD | DISKOMINFO KAB.LUMAJANG | 98% | 309.636.445 | DAU | | 98% | 340.600.090 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan | DISKOMINFO KAB.LUMAJANG | 10 Jenis | 9.076.870 | DAU | | 10 Jenis | 9.984.557 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan | DISKOMINFO KAB.LUMAJANG | 4 Jenis | 86.328.000 | DAU | | 4 Jenis | 94.960.800 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetak yang disediakan | DISKOMINFO KAB.LUMAJANG | 2 Jenis | 23.798.775 | DAU | | 2 Jenis | 26.178.653 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--|-------------|-------------|
| | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 1 Jenis | 4.204.200 | DAU | | 1 Jenis | 4.624.620 |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah fasilitas kunjungan tamu | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 1 Fasilitas | 4.650.000 | DAU | | 1 Fasilitas | 5.115.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah fasilitas rakor SKPD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 2 Fasilitas | 181.578.600 | DAU | | 2 Fasilitas | 199.736.460 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase fasilitas pengadaan BMD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 98% | 403.138.450 | DAU | | 98% | 728.007.295 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 10 Jenis | 403.138.450 | DAU | | 10 Jenis | 443.452.295 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 98% | 497.744.208 | DAU | | 98% | 547.518.629 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|--------------|-------------|------------|--|--------------|--------------------|
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 2 Fasilitasi | 3.228.000 | DAU | | 2 Fasilitasi | 3.550.800 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening yang dibayar | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 3 Rekening | 246.428.208 | DAU | | 3 Rekening | 271.071.029 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 4 Fasilitasi | 248.088.000 | DAU | | 4 Fasilitasi | 272.896.800 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 98% | 185.650.000 | DAU | | 98% | 304.215.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--|-------------|-------------|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 4 Kendaraan | 138.500.000 | DAU | | 4 Kendaraan | 152.350.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah alat besar yang dipelihara | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 1 Jenis | 6.700.000 | DAU | | 1 Jenis | 7.370.000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | DISKOMINFO KAB. LUMAJANG | 3 Jenis | 40.450.000 | DAU | | 3 Jenis | 44.495.000 |

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 yang disusun dan akan dijadikan pedoman dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Pokok-pokok dan rincian kegiatan yang disusun merupakan kelanjutan, peningkatan dan perluasan dari pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan mengacu, berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Lebih lanjut Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 disusun untuk dapat dijadikan pedoman bagi penjabaran tugas dan fungsi oleh segenap jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam rangka mengaktualisasikan Tupoksi yang dibiayai oleh anggaran berbasis kinerja sesuai dengan rencana yang realistis serasi dan berkesinambungan.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi apa yang telah termuat dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 dan semoga perbuatan kita dicatat sebagai amal ibadah. Amin.

Lumajang, 11 Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG


YOGA PRATOMO, S.STP
Pembina Tk.I/IV/b
NIP. 19780910 199802 1 001